



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM PAPUA**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal
31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 04 Januari 2024
Kepala,

Anthonius M Ayorbaba
NIP. 197105151996101001



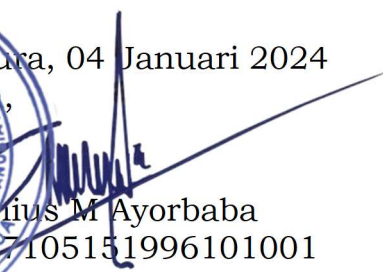
DAFTAR ISI

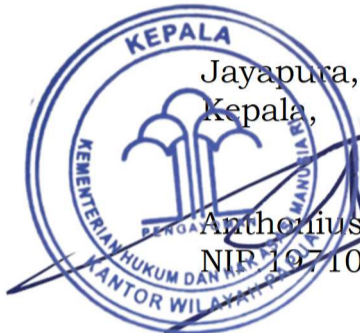
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	18
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
VI. Lampiran dan Daftar	41

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 04 Januari 2024
Kepala,

Anthonius M Ayorbaba
NIP. 197105151996101001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 sampai pada Periode Semester Ke II adalah sebesar Rp.887.125.390,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.893.823.000,-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.876.920.050,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.876.920.050,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan sebesar Rp.876.920.050,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.876.920.050,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.876.920.050,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 876.920.050,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23		% thd Angg	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1				1.307.400
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	1.307.400
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3				
Belanja Barang	B.4	883.617.000	876.920.050	99	564.929.630
Belanja Modal	B.5	10.206.000	10.205.340	100	
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		893.823.000	887.125.390	99	564.929.630

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
NERACA
PER 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Bagian Lancar TP/TGR	C.2		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.3		
Persediaan	C.4		
Jumlah Aset Lancar		-	
ASET TETAP			
Tanah	C.5		
Peralatan dan Mesin	C.6		
Gedung dan Bangunan	C.7		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8		
Aset Tetap Lainnya	C.9		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10		
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12		
Jumlah Aset Lainnya		-	
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang yang belum ditagihkan	C.13		
Uang Muka dari KPPN	C.14		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.15		
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		
Beban Persediaan	D.3		
Beban Barang dan Jasa	D.4	533.320.710	271.806.000
Beban Pemeliharaan	D.5		
Beban Perjalanan	D.6	343.599.340	293.123.630
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
JUMLAH BEBAN		876.920.050	564.929.630
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(876.920.050)	(564.929.630)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			1.307.400
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	1.307.400
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(876.920.050)	(563.622.230)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS/DEFISIT LO		(876.920.050)	(563.622.230)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
EKUITAS AWAL	E.1		
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(876.920.050)	(563.622.230)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.6	-	-
Jumlah Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		876.920.050	563.622.230
EKUITAS AKHIR	E.8	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Abepura No 37 Jayapura.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Bogor adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

<i>Pendapatan LO</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. <p>(2) Pendapatan-LO</p> <p>Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. <p>Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</p> <p>Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.</p>
<i>Belanja</i>	<p>(3) Belanja</p> <p>Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),</p> <p>Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>
<i>Beban</i>	<p>(4) Beban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Aset</i>	<p>5) Aset</p> <p>Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p>a. Aset Lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, • Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional) memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.893.823.000.- Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBPN		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja	-	-
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	935.121.000	883.617.000
Belanja Modal	10.572.000	10.206.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	945.693.000	893.823.000

Realisasi
Pendapatan
Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN			
Pendapatan Pendidikan			

Pendapatan Lain-lain			
Jumlah			

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN			
Pendapatan Pendidikan			
Pendapatan Lain-lain		1.307.400	(100)
Jumlah		1.307.400	(100)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp.887.125.390,-

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada Semester Ke II TA 2023 adalah sebesar Rp.887.125.390,- atau 99.25% dari anggaran belanja sebesar Rp.893.823.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	883.617.000	876.920.050	99.24
Belanja Modal	10.206.000	10.205.340	99.99
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	893.823.000	887.125.390	99.25
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	893.823.000	887.125.390	99.25

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 2.45 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Barang dan Belanja Modal untuk mendukung aktivitas perkantoran, sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Per Desember 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	876.920.050	564.929.630
Belanja Modal	10.205.340	
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah	887.125.390	564.929.630

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp.0,00*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 tidak mengalami kenaikan dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya penerimaan pegawai dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
2. Tidak adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja			

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp.876.920.050,-*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.876.920.050,-

dan Rp.564.929.630,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja Kegiatan Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional		10.173.000	
Belanja Bahan	57.060.710	58.123.000	
Belanja Barang Non Operasional		186.560.000	
Belanja Persediaan			
Belanja Jasa	476.260.000	16.950.000	
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Perjalanan Dinas	343.599.340	294.187.530	
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat			
Jumlah Belanja Kotor	876.920.050	565.993.530	
Pengembalian Belanja Barang	-	1.063.900	-
Jumlah Belanja	876.920.050	564.929.630	

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Anggaran Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum tersebut terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Pelayanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Non Litigasi) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja jasa konsultan (522131). Realisasi belanja Bantuan Hukum periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. 443.060.000,00 atau 99,75% dari Pagu Anggaran sebesar Rp 444.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi)	391.000.000	390.000.000	99,74
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Non Litigasi)	53.150.000	53.060.000	99,83
	Jumlah	444.150.000	443.060.000	99,75

Belanja Modal
Rp.10.205.340,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.10.205.340,00 dan Rp.0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2022 dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat Anggaran Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya	10.205.340		100
Jumlah Belanja Kotor	10.205.340		100
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	10.205.340		100

Belanja Modal Lainnya sebesar Rp 10.205.340 adalah berupa Pembelian Buku Monografi oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah
Rp.0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.0,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp.0,00 tidak mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.0,00. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung untuk gedung yang selesai direnovasi.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0,00 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi Gedung Kantor untuk para pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Renovasi Gedung Kantor			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0,00 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp.0,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember

2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank BNI No. Rek. 9890884089091000	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai		
Bank		
Jumlah		

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah		
Jumlah		

Piutang Bukan Pajak
Rp.0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB		
Piutang Lainnya		
Jumlah		

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp.0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka
Rp.0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah		

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp.

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah		

Persediaan
Rp.0,-

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-

Jumlah	-	-
---------------	---	---

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tidak terdapat barang konsumsi yang dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Aset Tetap
Rp.0

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp.0

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Tanah TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-		-
2	-		-
3	-		-
4	-		-
Jumlah			-

Peralatan dan Mesin
Rp.0,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah

sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp.0 ; dan

Pembelian peralatan komputer berupa *printer* senilai Rp.0

Hibah alat angkut darat bermotor berupa kendaraan bermotor Rp.0,00.

Transfer Masuk peralatan kantor senilai Rp.0,00

Koreksi Tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp.0,00

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp.0,00 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp.0,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2023	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penambahan gedung tempat kerja berupa tiga ruang kelas di sisi kanan gedung induk senilai Rp.0,00
Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.0,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	

Mutasi tambah:

Berupa penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp.0,

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp.0,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2.	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka
Panjang
Rp.0,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. dan Rp.0,00.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Bogor merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp.0,00

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
	Jumlah	-	-

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0,00*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00. dan Rp.0,00, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-		
2.			-
3.			
4.			
5.		-	
	Jumlah		

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0,00*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

Aset Lainnya

Rp.0,00

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp.0,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Mutasi tambah:

Pembelian berupa aplikasi penatausahaan PNBPN senilai Rp.0,00

Penambahan fitur pada Aplikasi Akuntansi Terpadu senilai Rp.0,00
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Penatausahaan PNB	-
2.	Aplikasi Akuntansi Terpadu	-
	Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp.0,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	
Mutasi tambah:	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	-
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari reklasifikasi mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp.0,00

Penghapusan Alat Angkut Darat Bermotor berupa kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp.0,00.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B.	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Total	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp.0,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Uang Muka dari KPPN
Rp.0,00

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.0,00

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
	Total	-

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada *Treasury Notional Pooling (TNP)* dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan 2023 yang belum dibayarkan kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0,00

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp.0,00

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp.0,00

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP Rp.0,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	-	
Pendapatan Pendidikan	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	

Pendapatan akrual berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu

*Beban Pegawai
Rp.0,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	-

Beban
Persediaan
Rp.0,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	

Beban Barang dan Jasa
Rp.533.320.710,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.533.320.710,00 dan Rp.271.806.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	-	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Honor Ouput Kegiatan	-	-	-
Beban Bahan	57.060.710	58.123.000	(1,83)
Beban Langganan Listrik	-	-	-
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Sewa	18.000.000	950.000	1.794,74
Beban Jasa Profesi	15.200.000	16.000.000	(5)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-

Beban Jasa Konsultasi	443.060.000	-	100
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	186.560.000	(100)
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	-	10.173.000	(100)
Jumlah Beban	533.320.710	271.806.000	96.21

Beban Pemeliharaan
Rp.0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah Beban	-	0	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp.343.599.340

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 343.599.340,00 dan Rp.293.123.630,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	332.799.340	279.473.630	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	13.650.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-

Jumlah Beban	343.599.340	293.123.630	-
---------------------	--------------------	--------------------	----------

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial Rp.0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang			
Jumlah Beban			

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan

Rp.

Rp.0,00 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan			
Beban Amortisasi Software		-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			
Jumlah Amortisasi			
Jumlah Beban			

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Rp.0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah Beban			

Kegiatan Non Operasional Rp.0,00 **D.11 Kegiatan Non Operasional**
 Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
 TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor			-
Selisih Kurs			
Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah Beban			

Pos Luar Biasa Nihil **D.12 Pos Luar Biasa**
 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.0 **E.1. Ekuitas Awal**
 Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO Rp.876.920.050 **E.2. Surplus/Defisit-LO**
 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.876.920.050 dan Rp.563.622.230,- Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0 **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**
 Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0 **E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**
 Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.
 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,00 **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**
 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp.0,00

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.876.920.050,00 dan Rp.563.622.230,00

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 31
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	887.125.340
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(10.205.340)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	876.920.050

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.887.125.340,00

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 32
Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
Jumlah			-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.10.205.340,00 adalah Transfer Keluar dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ke Divisi Administrasi berupa Buku Monografi.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah

dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dari total Rp.0,00 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.0,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 33
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023*

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
Total Pengesahan			-
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

*Ekuitas Akhir
Rp.0,00*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.